

Peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Pelestarian Budaya Lokal Di Kota Bengkulu

The Role Of The Department Of Education And Culture In Preserving Local Culture In Bengkulu City

Nindia Oktaria ¹⁾; Harius Eko Saputra ²⁾; Tuti Handayani IS ³⁾

^{1,2,3)} Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ nindiaoktariadea@gmail.com

How to Cite :

Oktaria. N., Saputra. H.E., Handayani. T. (2025). The Role Of The Department Of Education And Culture In Preserving Local Culture In Bengkulu City. *Social Sciences Journal*. 2(1). DOI:

ARTICLE HISTORY

Received [10 Oktober 2025]

Revised [17 November 2025]

Accepted [19 November 2025]

KEYWORDS

Role, Preservation, Local Culture.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelestarian budaya lokal di Kota Bengkulu. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Informan penelitian terdiri dari lima orang, yaitu dua informan kunci dan tiga informan pokok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan beberapa peran utama: pertama, penyusunan perumusan serta implementasi kebijakan kebudayaan melalui pendataan budaya; kedua, pembinaan komunitas dan lembaga adat yang terjalin melalui komunikasi aktif dengan Badan Musyawarah Adat, meskipun dukungan dana masih terbatas; ketiga, penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang dilakukan tiap tahun meskipun sistem pelaporan belum terintegrasi secara optimal; dan keempat, pelestarian tradisi serta nilai budaya yang mulai diikuti generasi muda, meski masih menghadapi tantangan globalisasi dan gaya hidup modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah berperan aktif, upaya pelestarian budaya lokal tetap menghadapi hambatan, khususnya pada aspek pendanaan, penguatan data budaya, dan partisipasi masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Department of Education and Culture in preserving local culture in Bengkulu City. The research applies a qualitative method with data collected through interviews and observations. The study involved five informants, consisting of two key informants and three supporting informants. The findings reveal that the Department of Education and Culture performs several major roles: first, formulating and implementing cultural policies through cultural data collection; second, fostering communities and traditional institutions through active communication with the Regional Customary Council, although financial support remains limited; third, preparing cultural management materials annually, despite weaknesses in reporting and follow-up systems; and fourth, preserving traditions and cultural values that are increasingly adopted by the younger generation, although globalization and modern lifestyles remain significant challenges. The study concludes that despite the active role of the Department of Education and Culture, cultural preservation efforts continue to face obstacles, particularly in terms of funding, strengthening cultural data, and community participation..

PENDAHULUAN

Budaya merupakan identitas sekaligus warisan yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya menjadi cermin peradaban, sarana perekat sosial, serta fondasi dalam pembentukan karakter masyarakat. Di Indonesia, keberagaman budaya yang dimiliki

merupakan kekayaan yang tidak ternilai, namun pada saat yang sama juga menghadapi tantangan besar akibat derasnya arus globalisasi. Modernisasi, kemajuan teknologi, serta penetrasi budaya asing yang masif dapat menggeser nilai-nilai lokal jika tidak diimbangi dengan upaya pelestarian yang terarah. Kondisi ini menempatkan pelestarian budaya sebagai isu penting yang perlu ditangani secara serius oleh pemerintah maupun masyarakat.

Kota Bengkulu sebagai salah satu daerah dengan kekayaan budaya lokal yang khas juga menghadapi tantangan serupa. Tradisi-tradisi adat, kesenian, bahasa daerah, serta praktik kebudayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi kini mengalami tekanan akibat perkembangan zaman. Pergeseran gaya hidup masyarakat, khususnya generasi muda, yang lebih tertarik pada budaya populer dan modern seringkali membuat budaya lokal terpinggirkan. Dalam konteks ini, keberadaan institusi pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menjadi sangat penting. Dinas ini memiliki mandat untuk menjaga, mengembangkan, serta melestarikan budaya lokal agar tetap hidup, relevan, dan dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Pelestarian budaya tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghormatan pada leluhur, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan karakter bangsa. Budaya dapat menanamkan nilai moral, etika, serta solidaritas sosial. Melalui pelestarian budaya, masyarakat diajak untuk menghargai identitas lokal sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap daerah asalnya. Di Kota Bengkulu, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mulai dari pendataan budaya, pembinaan lembaga adat, penyusunan program kebudayaan, hingga kegiatan promosi budaya melalui festival. Namun, pelaksanaan program-program tersebut sering menghadapi hambatan, baik dari sisi keterbatasan dana, partisipasi masyarakat, maupun pengaruh modernisasi yang begitu kuat.

Dari sudut pandang akademis, penelitian mengenai peran pemerintah daerah dalam pelestarian budaya menjadi sangat relevan. Teori kebijakan publik menjelaskan bahwa pemerintah, melalui perangkat birokrasi, berfungsi sebagai perancang dan pelaksana kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks pelestarian budaya, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menekankan pentingnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, serta pembinaan kebudayaan. Oleh sebab itu, keberadaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pelaksana kebijakan kebudayaan di Kota Bengkulu perlu dikaji secara mendalam, apakah perannya sudah optimal dalam menjawab tantangan pelestarian budaya lokal. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pelestarian budaya seringkali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya. Misalnya, penelitian tentang pelestarian budaya daerah di berbagai wilayah di Indonesia memperlihatkan bahwa meskipun ada regulasi dan program yang dirancang, implementasinya belum maksimal karena faktor pendanaan, SDM, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Kondisi ini juga terlihat di Kota Bengkulu, di mana meskipun program pelestarian sudah ada, tingkat partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan kebijakan dengan realitas pelaksanaannya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu telah melaksanakan berbagai kegiatan yang berfokus pada kebudayaan, seperti pengumpulan data potensi budaya, pembinaan sanggar seni, serta kerja sama dengan Badan Musyawarah Adat. Upaya ini patut diapresiasi, tetapi hasil penelitian awal memperlihatkan masih terdapat sejumlah kendala. Salah satunya adalah sistem dokumentasi budaya yang belum terintegrasi dengan baik, sehingga data budaya sulit diakses dan dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, keterbatasan dana operasional membuat banyak program yang dirancang tidak dapat berjalan sesuai rencana. Faktor lain yang juga penting adalah kesadaran masyarakat yang belum merata mengenai pentingnya pelestarian budaya, terutama di kalangan anak muda yang cenderung lebih akrab dengan budaya populer modern. Permasalahan ini semakin kompleks karena globalisasi memberikan tantangan baru. Teknologi digital yang menawarkan hiburan instan membuat sebagian besar generasi muda lebih tertarik pada budaya luar, sementara budaya lokal dianggap ketinggalan zaman. Jika kondisi ini terus dibiarkan, warisan budaya lokal berpotensi tergerus dan kehilangan relevansinya. Di sinilah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dituntut untuk kreatif dalam merancang program pelestarian yang mampu mengakomodasi kebutuhan generasi muda, misalnya melalui digitalisasi budaya, promosi seni tradisi lewat media sosial, dan integrasi nilai budaya dalam kurikulum pendidikan.

Kehadiran penelitian ini berangkat dari urgensi untuk memahami sejauh mana peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menjaga budaya lokal di tengah tantangan tersebut. Fokus penelitian diarahkan pada analisis kebijakan, pembinaan, dan program nyata yang telah dilakukan dinas, sekaligus menilai hambatan serta peluang yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran dinas dalam pelestarian budaya di Kota Bengkulu, serta menjadi masukan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif di masa depan.

Tujuan penelitian ini meliputi dua aspek. Pertama, untuk mendeskripsikan peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelestarian budaya lokal di Kota Bengkulu. Kedua, untuk mengidentifikasi

hambatan yang dihadapi serta peluang yang dapat dimanfaatkan dalam memperkuat pelestarian budaya. Manfaat penelitian ini diharapkan terasa baik secara akademis maupun praktis. Dari sisi akademis, penelitian ini memperkaya kajian tentang administrasi publik dan kebijakan kebudayaan daerah. Dari sisi praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam memperbaiki strategi pelestarian budaya. Selain itu, penelitian ini juga memberi manfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga budaya lokal sebagai bagian dari identitas bersama.

Pelestarian budaya tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Budaya adalah hasil karya kolektif yang hidup karena dipraktikkan, sehingga keberlanjutannya sangat tergantung pada keterlibatan generasi penerus. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, komunitas seni, akademisi, dan dunia pendidikan menjadi syarat penting dalam menjaga eksistensi budaya lokal. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai strategi pelestarian yang berkelanjutan. Melalui penelitian ini diharapkan muncul kesadaran bahwa budaya bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi juga aset untuk masa depan. Budaya lokal memiliki potensi besar dalam membangun identitas daerah, memperkuat pariwisata, dan meningkatkan daya tarik ekonomi kreatif. Oleh sebab itu, peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus terus diperkuat agar dapat merancang kebijakan dan program yang tidak hanya berfokus pada pelestarian, tetapi juga pada pemanfaatan budaya sebagai sumber daya pembangunan.

LANDASAN TEORI

Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (2013) adalah *“apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.”* Konsep ini menegaskan bahwa kebijakan merupakan hasil pilihan rasional pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian ini, kebijakan pelestarian budaya yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan publik. Dinas tersebut berperan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kebudayaan agar nilai-nilai lokal tetap terjaga di tengah arus globalisasi.

Teori Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menekankan empat pilar utama, yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

1. Perlindungan bertujuan menjaga budaya agar tidak punah atau hilang.
2. Pengembangan dimaksudkan untuk memperkaya budaya sehingga tetap relevan mengikuti perkembangan zaman.
3. Pemanfaatan menekankan pentingnya menjadikan budaya sebagai sumber kesejahteraan masyarakat.
4. Pembinaan diarahkan untuk mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi muda.

Dalam konteks penelitian ini, empat aspek tersebut digunakan sebagai kerangka dalam menganalisis sejauh mana peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu dijalankan secara optimal.

Teori Peran

Menurut Biddle dan Thomas (1966), peran merupakan seperangkat harapan yang dikenakan pada individu atau lembaga yang menduduki posisi tertentu dalam struktur sosial. Teori ini relevan karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menempati posisi strategis sebagai pelaksana kebijakan kebudayaan di tingkat daerah. Harapan masyarakat agar budaya lokal tetap lestari menjadi dasar peran formal sekaligus moral bagi dinas untuk bertindak. Dengan demikian, teori peran membantu menjelaskan hubungan antara tanggung jawab kelembagaan dan ekspektasi masyarakat.

Teori Partisipasi Masyarakat

Cohen dan Uphoff (1980) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif warga dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Teori ini penting dalam penelitian karena pelestarian budaya tidak mungkin hanya bergantung pada pemerintah. Budaya hidup melalui praktik sosial masyarakat. Oleh sebab itu, pelibatan komunitas adat, seniman lokal, lembaga pendidikan, hingga generasi muda menjadi kunci keberhasilan program pelestarian. Tanpa partisipasi masyarakat, kebijakan kebudayaan akan kehilangan legitimasi dan daya dukung sosial.

Teori Struktural Fungsionalisme

Talcott Parsons melalui teori struktural fungsionalisme menegaskan bahwa setiap unsur dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu yang menopang keteraturan sosial. Budaya berfungsi sebagai mekanisme integratif karena di dalamnya terdapat nilai, norma, dan simbol yang dianut bersama. Apabila budaya lokal mengalami pengikisan, maka keseimbangan sosial juga berpotensi terganggu. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dalam pelestarian budaya dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan harmoni sosial sekaligus memperkuat identitas masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelestarian budaya lokal di Kota Bengkulu. Pendekatan kualitatif dipilih agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran, strategi, dan kendala yang dihadapi oleh dinas, melalui penggalan data yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menjelaskan fenomena sosial secara kontekstual berdasarkan pengalaman dan pandangan informan yang terlibat langsung dalam kegiatan pelestarian budaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada penyajian data apa adanya berdasarkan fakta di lapangan tanpa manipulasi, kemudian dianalisis secara mendalam untuk menemukan makna yang relevan dengan rumusan masalah. Melalui penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan peran dinas, bentuk-bentuk pelestarian budaya, serta hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan program kebudayaan di Kota Bengkulu.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Bengkulu dengan fokus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai institusi utama yang memiliki kewenangan dalam bidang pelestarian budaya. Lokasi ini dipilih karena lembaga tersebut berperan langsung dalam menyusun kebijakan, program, serta kegiatan pelestarian budaya yang berhubungan dengan masyarakat, komunitas seni, maupun lembaga adat. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Pemilihan informan didasarkan pada kriteria tertentu, yaitu mereka yang dianggap memiliki informasi relevan terkait pelestarian budaya lokal di Bengkulu. Dalam penelitian ini, informan terdiri dari lima orang, yaitu dua informan kunci dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta tiga informan tambahan dari kalangan masyarakat adat dan komunitas seni. Pemilihan jumlah informan ini dianggap cukup untuk memperoleh data yang mendalam karena setiap informan mewakili perspektif yang berbeda sesuai dengan perannya dalam pelestarian budaya. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi langsung dari informan mengenai kebijakan, program, serta tantangan yang dihadapi dalam melestarikan budaya lokal. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung praktik atau kegiatan yang berkaitan dengan budaya, seperti festival, pembinaan komunitas adat, serta bentuk-bentuk pelestarian lain yang difasilitasi oleh dinas. Selain itu, teknik dokumentasi juga digunakan untuk melengkapi data penelitian, berupa arsip, dokumen kebijakan, laporan kegiatan, dan publikasi resmi terkait kebudayaan di Kota Bengkulu.

Proses analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Data yang sudah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang terstruktur agar memudahkan pemahaman. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara induktif, yakni berangkat dari data lapangan menuju generalisasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan data observasi dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan konfirmasi ulang kepada informan apabila terdapat data yang belum jelas, guna memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terkait peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelestarian budaya lokal di Kota Bengkulu. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan bagaimana dinas melaksanakan fungsinya, program yang dijalankan, serta hambatan yang dihadapi dalam proses pelestarian budaya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu memiliki peran penting dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan kebudayaan. Peran tersebut tercermin dalam upaya melakukan pendataan

budaya sebagai langkah awal dalam merumuskan kebijakan pelestarian. Melalui pendataan, dinas berusaha mengidentifikasi berbagai bentuk budaya lokal, baik berupa tradisi, kesenian, maupun nilai-nilai adat yang masih hidup di tengah masyarakat. Pendataan ini menjadi dasar dalam menyusun program kebudayaan, meskipun sistem dokumentasi yang ada belum sepenuhnya terintegrasi dan masih bersifat manual sehingga menyulitkan dalam hal aksesibilitas dan keberlanjutan.

Selain pendataan, dinas juga berperan dalam melakukan pembinaan terhadap komunitas seni dan lembaga adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi aktif terjalin antara dinas dan Badan Musyawarah Adat, meskipun keterbatasan dana menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan secara berkelanjutan. Dinas berupaya memfasilitasi kegiatan pelestarian budaya melalui penyelenggaraan festival, lomba kesenian, serta pelatihan bagi generasi muda. Namun, pelaksanaan kegiatan ini seringkali hanya bersifat temporer dan belum sepenuhnya terprogram secara sistematis.

Dalam aspek penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan, dinas telah membuat laporan tahunan mengenai kegiatan kebudayaan yang dilakukan. Akan tetapi, hasil penelitian menemukan bahwa laporan tersebut belum didukung oleh mekanisme evaluasi yang komprehensif. Tidak adanya sistem evaluasi yang kuat membuat tindak lanjut dari program seringkali terhambat, sehingga keberlanjutan pelestarian budaya tidak berjalan secara konsisten.

Peran lain yang cukup menonjol adalah dalam upaya melestarikan tradisi dan nilai budaya lokal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melibatkan sekolah dan lembaga pendidikan dalam mengintegrasikan nilai budaya ke dalam kegiatan pembelajaran, meskipun implementasinya masih terbatas. Program seperti pengenalan tari daerah, lomba pidato bahasa lokal, dan festival budaya di sekolah menjadi langkah positif dalam memperkenalkan budaya kepada generasi muda. Namun, pengaruh globalisasi dan gaya hidup modern tetap menjadi tantangan besar yang menyebabkan generasi muda cenderung lebih tertarik pada budaya populer dibandingkan budaya tradisional.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap pelestarian budaya relatif bervariasi. Sebagian masyarakat, terutama kelompok adat dan komunitas seni, menunjukkan keterlibatan aktif dalam kegiatan budaya. Akan tetapi, tingkat partisipasi generasi muda masih rendah karena kurangnya inovasi dalam penyajian budaya. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi baru agar budaya lokal dapat dikemas lebih menarik, misalnya melalui digitalisasi budaya, pemanfaatan media sosial, serta integrasi budaya ke dalam industri kreatif dan pariwisata. Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu telah berperan aktif dalam melaksanakan fungsi pelestarian budaya lokal melalui pendataan, pembinaan, penyusunan laporan, serta upaya melestarikan tradisi dan nilai-nilai budaya. Namun, keterbatasan dana, lemahnya sistem dokumentasi, kurangnya evaluasi program, dan rendahnya partisipasi generasi muda menjadi faktor yang menghambat keberhasilan pelestarian budaya secara menyeluruh. Oleh sebab itu, meskipun peran dinas sudah berjalan, masih diperlukan penguatan strategi, dukungan anggaran, serta inovasi dalam mengembangkan program pelestarian agar budaya lokal dapat tetap hidup di tengah arus modernisasi.

Pembahasan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu telah menjalankan perannya dalam pelestarian budaya lokal melalui beberapa aspek, yaitu pendataan budaya, pembinaan komunitas seni dan lembaga adat, penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan, serta upaya pelestarian tradisi dan nilai budaya di masyarakat. Peran ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menekankan empat pilar utama, yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Dengan kata lain, aktivitas yang dilakukan dinas telah berada dalam kerangka regulasi nasional meskipun dalam praktiknya masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Pendataan budaya yang dilakukan dinas merupakan langkah awal yang penting karena tanpa basis data yang jelas, kebijakan dan program pelestarian sulit dirumuskan secara tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan pandangan Dye (2013) yang menegaskan bahwa kebijakan publik merupakan pilihan pemerintah untuk bertindak. Dalam kasus ini, tindakan berupa pendataan budaya merupakan bentuk implementasi kebijakan pelestarian di tingkat daerah. Akan tetapi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem dokumentasi budaya di Kota Bengkulu masih bersifat manual dan belum terintegrasi, sehingga upaya ini belum maksimal dalam mendukung proses pengambilan keputusan.

Peran pembinaan terhadap komunitas seni dan lembaga adat yang dilakukan dinas menunjukkan adanya kesadaran bahwa pelestarian budaya tidak dapat berjalan tanpa partisipasi masyarakat. Temuan ini selaras dengan teori partisipasi Cohen dan Uphoff (1980) yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat pada setiap tahap pembangunan. Keterlibatan Badan Musyawarah Adat dan komunitas seni di Kota Bengkulu membuktikan adanya sinergi, meskipun terbatas pada kegiatan tertentu yang seringkali bersifat seremonial. Minimnya dukungan dana membuat pembinaan tidak berkesinambungan, sehingga

hasilnya kurang maksimal dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat. Dalam aspek penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu telah menyusun laporan kegiatan setiap tahun, tetapi belum didukung mekanisme evaluasi yang komprehensif. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui teori peran Biddle dan Thomas (1966), bahwa setiap lembaga memiliki seperangkat harapan sosial. Dalam hal ini, masyarakat mengharapkan dinas mampu merancang program kebudayaan yang tidak hanya terdokumentasi dalam laporan, tetapi juga memiliki tindak lanjut nyata. Ketiadaan evaluasi membuat peran yang dijalankan belum sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi masyarakat.

Upaya melestarikan tradisi dan nilai budaya melalui sekolah, festival, serta lomba kesenian menunjukkan adanya langkah positif yang dilakukan dinas. Hasil ini sejalan dengan teori struktural fungsionalisme Talcott Parsons yang menyatakan bahwa setiap unsur dalam masyarakat berfungsi menjaga keseimbangan sosial. Budaya berperan sebagai mekanisme integratif yang menyatukan masyarakat melalui nilai dan norma. Dengan demikian, pelestarian budaya di sekolah dan komunitas tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga berfungsi mempertahankan kohesi sosial. Namun, pengaruh globalisasi dan budaya populer modern tetap menjadi tantangan yang signifikan, terutama bagi generasi muda. Penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi generasi muda dalam pelestarian budaya masih rendah. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan formal dan realitas sosial. Budaya lokal sering dianggap kurang menarik dibanding budaya populer, sehingga diperlukan strategi baru agar generasi muda merasa memiliki kedekatan dengan tradisi daerah. Inovasi melalui digitalisasi budaya, pemanfaatan media sosial, serta integrasi budaya ke dalam industri kreatif menjadi langkah yang relevan untuk menjawab tantangan tersebut.

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian-penelitian terdahulu yang menyoroti peran pemerintah daerah dalam pelestarian budaya. Misalnya, studi Betania et al. (2023) menemukan bahwa keberhasilan pelestarian budaya sangat dipengaruhi faktor dukungan dana, partisipasi masyarakat, serta kreativitas dalam mengemas budaya agar tetap diminati generasi muda. Dengan demikian, hasil penelitian di Kota Bengkulu memperkuat bukti bahwa peran pemerintah dalam kebudayaan harus selalu dikaitkan dengan kolaborasi dan inovasi.

Secara umum, pembahasan ini menegaskan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu telah berperan aktif dalam melaksanakan pelestarian budaya, meskipun masih terdapat kelemahan dalam aspek pendanaan, dokumentasi, evaluasi, serta partisipasi masyarakat. Tantangan tersebut justru membuka peluang untuk melakukan perbaikan, terutama melalui penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan serta pemanfaatan teknologi digital sebagai media promosi dan edukasi budaya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian mengenai peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelestarian budaya lokal di Kota Bengkulu menghasilkan temuan bahwa dinas tersebut telah menjalankan fungsi penting dalam menjaga keberlangsungan budaya daerah. Peran utama yang dilakukan meliputi pendataan budaya, pembinaan komunitas seni dan lembaga adat, penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan, serta pelestarian tradisi dan nilai-nilai budaya melalui berbagai kegiatan. Upaya ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk melestarikan identitas budaya yang dimiliki masyarakat Bengkulu.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya optimal. Pendataan budaya masih terbatas karena sistem dokumentasi belum terintegrasi secara baik, pembinaan komunitas seni dan lembaga adat terkendala oleh minimnya dukungan dana, serta penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan belum didukung evaluasi yang menyeluruh.

Upaya pelestarian budaya melalui sekolah dan festival memang memberi dampak positif, tetapi belum mampu meningkatkan partisipasi generasi muda secara signifikan. Kesimpulan utama yang dapat ditarik adalah bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu telah berperan aktif dalam melestarikan budaya lokal, namun efektivitas peran tersebut masih menghadapi tantangan dari aspek pendanaan, kelembagaan, serta kesadaran masyarakat. Faktor globalisasi dan modernisasi juga menjadi hambatan serius yang memengaruhi minat generasi muda terhadap budaya tradisional. Oleh karena itu, pelestarian budaya memerlukan strategi yang lebih inovatif dan kolaboratif agar nilai-nilai lokal tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sesuai kebutuhan zaman.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk memperkuat peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelestarian budaya lokal di Kota Bengkulu. Pertama, dinas perlu memperbaiki sistem pendataan dan dokumentasi kebudayaan agar lebih terintegrasi dan mudah diakses. Digitalisasi data budaya dapat menjadi langkah strategis sehingga potensi budaya lokal terdokumentasi dengan baik dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan.

Kedua, diperlukan peningkatan dukungan dana dan sumber daya manusia dalam program pelestarian budaya. Alokasi anggaran yang memadai akan memungkinkan pelaksanaan pembinaan komunitas seni dan lembaga adat secara berkelanjutan, bukan hanya seremonial. Selain itu, pelatihan bagi aparat dinas juga penting untuk meningkatkan kapasitas dalam merancang program budaya yang kreatif dan inovatif.

Ketiga, partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih sesuai dengan minat mereka. Dinas dapat memanfaatkan media sosial, platform digital, serta mengintegrasikan nilai budaya dalam kegiatan pendidikan dan industri kreatif agar budaya lokal tampil lebih menarik dan relevan. Dengan demikian, budaya tidak hanya dipandang sebagai warisan masa lalu, melainkan juga sebagai bagian dari gaya hidup dan sumber kebanggaan generasi sekarang.

Keempat, diperlukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat adat, komunitas seni, akademisi, serta sektor swasta. Sinergi ini dapat memperkuat program pelestarian budaya sekaligus membuka peluang pemanfaatan budaya dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan adanya kerja sama yang lebih luas, upaya pelestarian budaya dapat memberikan dampak tidak hanya pada aspek identitas, tetapi juga kesejahteraan masyarakat.

Kelima, penelitian lanjutan di bidang ini perlu dilakukan dengan cakupan yang lebih luas, misalnya menambahkan variabel lain seperti loyalitas masyarakat terhadap budaya, peran teknologi digital, atau keterlibatan dunia pendidikan dalam pemajuan kebudayaan. Kajian lebih mendalam akan memperkaya pemahaman mengenai strategi pelestarian budaya yang paling efektif dalam menghadapi tantangan globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Jamaluddin. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Diana,P. (2017). *Peran Dan Pengembangan Industri Kreatif Dalam Mendukung Pariwisata Di Desa Mas Dan desa Peliatan, Ubud*. Jurnal Analisis Pariwisata ISSN, 1410, 3729
- Gouzali Saydam. (1996). *Manajemen dan Bawahan*. Jakarta : Djambatan.
- Maulida Putri. (2020). *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas PalangkaRaya Kota Palangka Raya*.
https://www.academia.edu/download/62869796/PUTRI_GABUNGAN20200408-97393-b0xpz.pdf.
- Morisson. (2019). *Riset Kualitatif*. Jakarta: Prenanda media Groip.
- Muchsin Slamet. (2021). *Implementasi Kebijakan Pengurangan Resiko Bencana (Studi Pada Pengurangan Resiko Bencana Erupsi Gunung, Kelud 2014 Di Jawa Timur)*. Unisma Press, Gedung Umar bin Khattab Kantor Pusat LT.3, Universitas Islam Malang.
- Peraturan walikota Bengkulu No. 6 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
- Refisrul, Y., Yulisman. (2014). Peran lembaga adat dalam pelestarian budaya di kota Bengkulu provinsi Bengkulu. (repositori.kemdikbud.go.id)
<https://scholar.google.com/download.pdf>.
- Rois, Leonard Arios. (2017). Barong Landong Fungsi dan Pelestariannya Sebagai Identitas Budaya Orang Lembak Di Kota Bengkulu. Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya 3 (02), 749-771.
<https://jurnalbpnbsumbar.kemdikbud.go.id/index.php/article.pdf>.

Suhardono Edy. (2018). *Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Pengantar, Sarlito Wirawan Sarwono. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sudarsana, U. (2014). *Pembinaan minat baca*. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PUST4421-M1.pdf>

Unived. (2024). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Administrasi Publik*. Bengkulu.